



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 58 Tahun 2005

T E N T A N G

**RENCANA OPERASI
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU
TAHUN 2005 (1426 H)**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H), yang tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat, perlu dilakukan perencanaan, pemantauan dan pengendalian secara terpadu;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 No. 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);

5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426H).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA OPERASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H).

Pasal 1

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada Angkutan Lebaran Tahun 2005 diatur Rencana operasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H) diatur sebagai berikut :

- a. **Angkutan Jalan, Kereta Api, Penyeberangan serta Angkutan Udara** dilaksanakan dalam kurun waktu antara Hari Kamis, 27 Oktober 2005 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Jum'at, 11 Nopember 2005 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat;
- b. **Angkutan Laut** dilaksanakan dalam kurun waktu antara Hari Rabu, 19 Oktober 2005 (H-15) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Selasa, 19 Nopember 2005 (H+15) pukul 24.00 waktu setempat.

Pasal 3

Untuk pemantauan dan pengendalian Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H) dibentuk Posko Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan secara berjenjang **mulai Hari Kamis, 27 Oktober 2005 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Jum'at, 11 Nopember 2005 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat.**

Pasal 4

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pada moda darat meliputi wilayah Propinsi Lampung, Pulau Jawa dan Bali, moda laut meliputi 50 Pelabuhan dan moda udara meliputi 20 Bandar Udara secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat.

Pasal 5

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) dilaksanakan melalui persiapan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tetap mengutamakan koordinasi antar instansi guna keterpaduan dalam pelaksanaannya.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 September 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Panglima TNI;
11. Kepala Kepolisian RI;
12. Menteri Komunikasi dan Informasi;
13. Para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
14. Para Bupati/Walikota;
15. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, Kepala Badan Litbang,
16. Kepala Badan SAR Nasional dan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika;
17. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi seluruh Indonesia;
18. Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Kota/Kabupaten seluruh Indonesia;

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM. 58 Tahun 2005

Tanggal : 26 September 2005

RENCANA OPERASI PENYELENGGARAN ANGKUTAN LEBARAN TERPADU TAHUN 2005 (1426 H)

I. TUGAS POKOK

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu dibentuk Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu. Tim Koordinasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Perhubungan dengan didukung sejumlah Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran terpadu agar dapat berjalan dengan tertib, cepat aman, nyaman dan selamat.

II. WILAYAH DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

A. Wilayah Penyelenggaraan.

1. Transportasi Darat.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi:

a). Angkutan Jalan

Dititik beratkan pada 8 (delapan) propinsi yaitu : Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali.

b). Angkutan Kereta Api

Dititikberatkan pada 9 (sembilan) Daerah Operasi yaitu : Daop I DKI Jakarta, Daop II Bandung, Daop III Cirebon, Daop IV Semarang, Daop V Purwokerto, Daop VI Yogyakarta, Daop II Madiun, Daop VIII Surabaya dan Daop IX Jember.

c). Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Dititikberatkan pada 7 (tujuh) lintasan utama yaitu : Merak-Bakauheni, Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar, Khayangan-Pototano, Palembang-Muntok dan Bajo'e-Kolaka.

2. Transportasi Laut.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi 50 (lima puluh) pelabuhan laut.

3. Transportasi Udara.

Mencakup seluruh wilayah Indonesia, dengan titik berat pengendalian terpadu meliputi 20 (duapuluh) Bandara.

4. Pos dan Telekomunikasi.

a). Pelayanan Pos dan Telekomunikasi mencakup seluruh wilayah Indonesia dengan mengkoordinasikan kegiatan Pos dan Telekomunikasi dalam rangka kesiapsiagaan dan mengendalikan unsur-unsur Pos dan Telekomunikasi di seluruh wilayah tanggung jawab Pos dan Telekomunikasi.

b). Pelayanan Badan SAR Nasional .

Pelayanan Badan SAR Nasional mencakup seluruh wilayah territorial Republik Indonesia baik darat, laut maupun udara dengan mengkoordinasikan kegiatan SARNAS dalam rangka kesiapsiagaan dan mengendalikan unsur-unsur SAR di seluruh wilayah tanggung jawab Badan SAR Nasional, dalam rangka mengantisipasi terjadinya musibah/kecelakaan pelayaran, penerbangan, bencana dan musibah lainnya.

c). Pelayanan Meteorologi dan Geofisika.

Pelayanan Meteorologi dan Geofisika mencakup seluruh Wilayah Indonesia yang dipusatkan pada Kantor-kantor Balai Meteorologi dan Geofisika, yaitu : Wilayah I di Medan, Wilayah II di Jakarta, Wilayah III di Denpasar, Wilayah IV di Makassar, Wilayah V di Jayapura dan Kantor Badan Meteorologi dan Geofisika Pusat Jakarta.

B. Waktu Penyelenggaraan.

Waktu pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) dilaksanakan pada :

1. Hari Kamis, 27 Oktober 2005 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Jum'at, 11 Nopember 2005 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat, untuk :
 - a). Angkutan Jalan
 - b). Angkutan Kereta Api
 - c). Angkutan Penyeberangan
 - d). Angkutan Udara
2. Hari Rabu, 19 Oktober 2005 (H-15) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Sabtu, 19 Nopember 2005 (H+15) pukul 24.00 waktu setempat, untuk Angkutan Laut.
3. Pelaksanaan Kegiatan Pendukung meliputi pelayanan Postel, SARNAS dan Meteorologi dan Geofisika disesuaikan dengan kebutuhan.

Untuk melakukan pemantauan dan pengendalian angkutan lebaran, dan sebagai sarana komunikasi dan informasi, dibentuk Pos Koordinasi (POSKO) Angkutan Lebaran Terpadu baik di Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota. **Untuk Tahun 2005 diujicobakan penggunaan Sistem Manajemen Krisis Center untuk membantu pelaksanaan pemantauan dan pengendalian.** POSKO dilaksanakan secara berjenjang mulai Hari Kamis, 27 Oktober 2005 (H-7) pukul 00.00 waktu setempat s/d Hari Jum'at, 11 Nopember 2005 (H+7) pukul 24.00 waktu setempat.

III. ASUMSI

Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) ini disusun berdasarkan asumsi bahwa selama masa Angkutan Lebaran :

- a. Tidak terjadi gejolak sosial dan/atau kerusuhan sosial yang berskala Nasional;
- b. Tidak terjadi bencana alam di luar kemampuan;
- c. Tidak terjadi pemogokan operator sarana angkutan umum;
- d. Tidak terjadi kemacetan lalu lintas di luar perkiraan.
- e. Tidak terjadi ancaman/musibah akibat tindakan terorisme.

Untuk memudahkan pengaturan dan pendataan dalam penyelenggaraan angkutan lebaran dilakukan dalam dua tahap yaitu pada saat arus mudik dan arus balik.

Yang dimaksud **Arus Mudik** adalah seluruh perjalanan mulai H-7 s/d H2 (jumlah perjalanan hingga H2), sedangkan **Arus Balik** merupakan perjalanan mulai H+1 s/d H+7 (jumlah perjalanan mulai H+1 hingga selesai masa lebaran).

IV. KEADAAN DAN MASALAH

A. Keadaan

1. Lebaran merupakan salah satu kegiatan sosial budaya bangsa Indonesia yang ditandai dengan mengunjungi orang tua, saudara, kerabat atau handai taulan yang dilakukan setahun sekali. Perjalanan ini sebagian besar dilakukan ke kampung halaman yang waktunya secara bersamaan sehingga mengakibatkan permintaan jasa angkutan meningkat dengan tajam, baik moda angkutan darat, laut maupun udara. Disamping meningkatnya lalu lintas orang, lalu lintas barang dan kebutuhan pokok untuk keperluan lebaran juga meningkat dengan drastis seiring dengan kebutuhan masyarakat pada hari lebaran.
2. Adanya kebijaksanaan Pemerintah dalam pengaturan Hari Libur dan Cuti bersama Idul Fitri (mulai tanggal 2 – 8 Nopember 2005) akan menambah hasrat untuk melakukan perjalanan ke daerah baik untuk tujuan mudik, berlibur atau tujuan lain sehingga membawa konsekuensi pada peningkatan gangguan keamanan, perubahan pola arus mudik yang harus dicermati guna mengurangi terjadinya kemacetan di ruas jalan tertentu dan penumpukan penumpang serta kendaraan di berbagai terminal, dermaga penyeberangan, stasiun kereta api, pelabuhan atau bandar udara tertentu.
3. Adanya kenaikan tarif pesawat udara yang disebabkan karena naiknya harga bahan bakar minyak Aftur, diprediksikan akan mendorong sebagian pengguna pesawat udara untuk jarak sedang akan berpindah/beralih ke moda Jalan, sebagai contoh untuk rute-rute penerbangan Jakarta-Palembang, Jakarta-Pekanbaru, dsb.
4. Dengan dibukanya Tol Cipularang, diprediksikan akan terjadi pergeseran arus lalu lintas khususnya pada Jalur Selatan Pulau Jawa. dan arus lalu lintas terusan (Through Traffic) di jalur Puncak Bogor sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang yang cermat terhadap arus lalu lintas yang diperkirakan terjadi serta kebijakan pengalihan arus lalu lintas baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan umum selama periode lebaran sebagaimana dilakukan pada masa Angkutan lebaran tahun lalu.
5. Dengan memperhatikan kecenderungan angkutan lebaran selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan, maka diperkirakan jumlah pemudik dan kendaraan yang melakukan perjalanan mudik lebaran tahun 2005 (1426 H) akan cenderung meningkat dibanding dengan angkutan lebaran tahun yang lalu.

6. Kondisi geografis tanah air yang masih rawan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dll, meningkatkan potensi gangguan terhadap kelancaran arus transportasi.

B. Permasalahan

1. Gangguan Keamanan

Berbagai gangguan keamanan cenderung meningkat selama penyelenggaraan Angkutan lebaran seperti pemerasan, penipuan, pencopetan, pemaksaan dan calo-calo angkutan di terminal, stasiun, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan Bandar udara serta gangguan keamanan lain di beberapa ruas jalan yang rawan terhadap aksi kejahatan.

2. Kemacetan Lalu Lintas

Kemacetan lalu lintas khususnya angkutan jalan dimungkinkan masih akan terjadi meskipun telah dieliminir agar kemacetan yang terjadi tidak dalam kurun waktu yang lama. Beberapa faktor yang menjadi penyebab kemacetan lalu lintas serta lokasi titik rawan terjadinya kemacetan lalu lintas antara lain :

1. Tempat pengisian BBM (SPBU) dan rumah makan
2. Pasar tradisional/pasar tumpah (Pasar Sukra, Pasar Patrol, Pasar Karangampel, Pasar Gebang, Pasar Bulakamba, Pasar Tanjung, Pasar Tegal Gubug) dan pungutan /sumbangan di ruas jalan.
3. Keterbatasan kapasitas jalan pada ruas Cadas Pangeran (daerah rawan longsor), ruas Sadang-Subang-Pamanukan, ruas Sadang-Subang-Cijelag serta daerah Patrol dan sekitarnya.
4. Aktivitas tempat-tempat kegiatan pariwisata seperti : Puncak di Bogor, Ciater di Lembang, Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Anyer di Banten dan Pasir Putih di Lampung, Nagrek.
5. Perlintasan Kereta Api sebidang pada ruas Prupuk-Purwokerto, ruas Kebumen-Purwokerto (Gombong-Sumpiuh) dan ruas Cicalengka-Garut.

3. Pelanggaran.

Pelanggaran cenderung tetap terjadi sebagai akibat kompleks dari kelemahan hukum, eforia reformasi dan adanya lonjakan penumpang seperti pelanggaran tarif, penelantaran penumpang dan atau perlakuan yang kurang baik terhadap penumpang, pelanggaran batas muatan lebih, pelanggaran perijinan dan trayek, pelanggaran terhadap standar keselamatan kelaikan jalan serta pelanggaran lalu lintas dan angkutan.

4. Keterpaduan Antar Moda pada simpul-simpul transportasi tertentu terutama moda jalan dan moda penyeberangan masih dirasakan kurang misalnya "bottle neck" pada pelabuhan penyeberangan, ketiadaan angkutan pendukung pada pelabuhan, tidak adanya bus kota yang melayani pada malam hari, dll.

5. Rendahnya Disiplin Berlalu Lintas

Masih rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan kesadaran akan arti pentingnya keselamatan baik operator maupun pengguna jasa transportasi menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan cukup besar serta dapat memperburuk permasalahan kemacetan lalu lintas pada ruas Jalan.

6. Pergeseran Arus Lalu Lintas akibat dioperasikannya Tol Cipularang

Dampak dioperasikannya Tol Cipularang akan menyebabkan peningkatan lalu lintas pada ruas Tol Cikampek, Pintu Keluar Tol Pasteur (Bandung) dan arus lalu lintas pada jalur Selatan Pulau Jawa serta akan menurunkan arus lalu lintas terusan (Through Traffic) pada jalur Puncak Bogor.

7. Peningkatan Jumlah Penggunaan Kendaraan Pribadi & Sepeda Motor

Peningkatan jumlah pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor yang sangat signifikan terlihat pada pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun lalu. Khususnya pengguna sepeda motor, mereka melakukannya secara berombongan/platoon dan hal ini secara tidak langsung menyebabkan kemacetan di POM Bensin (SPBU) saat hendak mengisi bensin ataupun hanya untuk melepas lelah.

8. Kondisi Prasarana Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan hasil survai Tim lapangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur Lebaran 2005 (1426 H), antara lain :

- a. Kerusakan jalan pada jalur Pantura (khususnya ruas Cikampek – Cirebon), Lintas Selatan Jawa, Lintas Tengah dan Lintas Timur Sumatera.
- b. Kerusakan jembatan di Jalur Sumatera Propinsi Lampung yaitu jembatan Way Pangubuhan yang berada pada jalur vital lalu lintas yang menuju Lintas Timur Sumatera.

- c. Kurang Memadainya Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) Khususnya pada Jalan-jalan Alternatif.

9. Musim Hujan

Curah hujan yang tinggi diperkirakan berlangsung selama masa Angkutan Lebaran 2005 (1426 H) dapat menimbulkan berbagai macam bencana alam baik di darat, laut maupun di udara yang berupa hujan lebat, banjir, tanah longsor, angin kencang dan atau badai, arus dan atau ombak besar, kabut dan cuaca buruk serta petir dan badai magnetik yang dapat mengancam kelancaran serta keselamatan lalu lintas di darat, laut dan udara, juga dapat mengganggu sistem pos dan telekomunikasi.

10. Terbatasnya sarana dan prasarana BASARNAS

Kemampuan sarana dan prasarana yang dimiliki Basarnas belum sepadan dengan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sehingga apabila terjadi kecelakaan atau bencana alam pada daerah-daerah yang jauh dari jangkauan wilayahnya, BASARNAS akan mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan SARNAS yang cepat.

V. PREDIKSI PERMINTAAN ANGKUTAN

A. Umum

Jumlah permintaan angkutan pada periode angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H) secara total diperkirakan akan mencapai angka sekitar 16.396.001 orang atau **naik** sebesar **9,09%** dari jumlah penumpang pada periode angkutan lebaran tahun 2004 (1425 H) yang mencapai angka 15.029.450 orang. Adapun rincian perbandingan dan jumlah prediksi permintaan penumpang untuk masing-masing moda angkutan pada periode lebaran tahun 2005 (1426 H) adalah sebagai berikut :

NO	MODA	JUMLAH PENUMPANG		%
		1425 H	1426 H*	
1.	ANGKUTAN DARAT	12.812.061	13.674.694	6,70
	a. Angkutan Jalan	8.678.951	8.987.905	3,56
	b. Angkutan Kereta Api	1.745.467	2.179.764	24,90
	c. Angkutan SDP	2.387.643	2.507.025	5,00
2.	ANGKUTAN LAUT	860.646	886.465	3
3.	ANGKUTAN UDARA	1.356.743	1.834.842	35,20
JUMLAH		15.029.450	16.396.001	9,09

Keterangan :

* Prediksi jumlah penumpang pada lebaran tahun 2005 (1426 H)

B. Kegiatan Penunjang

1. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.
 - a) Memberi kemudahan dalam rangka komunikasi antara petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran Terpadu 2005 (1426 H);
 - b) Pemasangan sambungan baru untuk dipergunakan selama periode angkutan lebaran di Posko Pusat.
2. Pelayanan Badan SAR Nasional.
 - a) Kepentingan kelancaran arus lalu lintas untuk kegiatan pengendalian dan inspeksi oleh Menteri Perhubungan dalam rangka pengendalian lalu lintas darat di 8 (delapan) wilayah pengendalian terpadu.
 - b) Penanggulangan musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam dan bencana lainnya.
3. Pelayanan Meteorologi dan Geofisika.

Informasi yang tersedia di BMG dalam rangka mendukung Angkutan lebaran tahun 2005 khususnya terkait dengan pelayanan jasa Meteorologi dan Geofisika untuk penerbangan dan Maritim (pelayaran) serta untuk umum antara lain :

- a) Informasi meteorologi
 - 1) Prakiraan cuaca harian (setiap 6 jam) dengan daerah prakiraan Sumatera Selatan – Jawa – Bali pada Jalur Darat, Laut dan Udara.
 - 2) Prakiraan Cuaca Mingguan.
 - 3) Peringatan Dini
 - 4) Informasi Badai Tropis (jika ada)
 - 5) Informasi liputan awan hujan
 - 6) Angin kencang
- b) Informasi Klimatologi untuk wilayah jalur Angkutan lebaran
 - 1) Prakiraan sifat dan curah hujan dasarian dan bulanan.
 - 2) Prakiraan curah hujan tertinggi.
- c) Informasi prakiraan daerah rawan banjir dan longsor di Jawa dan Sumatera (hasil kerja sama BMG, PSDA-PU, DVMBG-ESDM dan Bakosurtanal).

VI. KESIAPAN SARANA ANGKUTAN

A. Sarana Angkutan

Kesiapan sarana angkutan dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H) untuk wilayah pengendalian di 8 (delapan) propinsi untuk seluruh jenis moda angkutan, mempunyai kapasitas angkut sebesar \pm 43,12 juta penumpang. Kondisi ini diprediksikan dapat mengangkut jumlah penumpang pada masa Angkutan lebaran yang diprediksikan berjumlah 16.396.001 penumpang, dengan rincian kapasitas angkut untuk masing-masing moda angkutan sebagai berikut :

NO	MODA	JUMLAH ARMADA	KAPASITAS ANGKUT
1.	ANGKUTAN DARAT 1. Angkutan Jalan 2. Angkutan Kereta Api 3. Angkutan SDP	32.053 Bus Reguler 221 KA 98 Kapal Ro-Ro. 15 Kapal Cepat.	\pm 23,10 Juta Pnp \pm 3,16Juta Pnp \pm 9,46 Juta Pnp
2.	ANGKUTAN LAUT	23 Kpl PELNI 27 Kpl Cepat SWASTA 462 Kpl SWASTA 48 Kpl PERINTIS	\pm 3.16 Juta Pnp
3.	ANGKUTAN UDARA	55 Psw GARUDA 34 Psw MERPATI 8 Psw BOUROQ 15 Psw MANDALA 18 Psw DAS 6 Psw Bali 5 Psw Pelita 4 Psw Trigana 11 Psw Jatayu 1 Psw Kartika 6 Psw Star 3 Psw Sriwijaya 3 Psw Wings Abadi 14 Psw Metro Batavia 2 Psw Riau 6 Psw Deraya 2 Psw Travel Express 3 Psw Adam 20 Psw Lion	\pm 4,24 Juta Pnp

B. Kegiatan Penunjang

1. Pelayanan Pos dan Telekomunikasi.

Membantu dalam hal penyediaan alat komunikasi penunjang angkutan lebaran Tahun 2005 (1426 H) berupa saluran telepon, Radio Trunking, PSTN.

2. Pada lebaran tahun ini akan digunakan CCTV untuk memonitor kondisi angkutan lebaran pada titik-titik lokasi tertentu yang dipandang perlu antara lain di terminal, stasiun KA, pelabuhan penyeberangan dan di lintas Pantura. CCTV dioperasikan secara online di Pos Koordinasi Tingkat Nasional Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) di Departemen Perhubungan, Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat.

3. Untuk sistem informasi juga dapat dilakukan melalui internet dengan Alamat Website : <http://www.hubdat.go.id>.

4. Pelayanan Badan SAR Nasional.

Basarnas menyiapkan dan mengoperasikan sarana dan prasarana semaksimal mungkin yang meliputi SAR Unit (SRU) udara, laut maupun darat berikut personil dan fasilitas pendukung lainnya, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor SAR, baik untuk keperluan SARNAS maupun untuk kegiatan Menteri Perhubungan beserta jajaran Pejabat yang terkait, dengan rincian sebagai berikut :

- a. SRU Udara : 2 (dua) buah helikopter BO-105 ditempatkan di Landasan Udara ATS Bogor siaga on call.
- b. SRU Laut : 9 (sembilan) Rescue Boat dan 10 Sea Rider akan ditempatkan di Kantor SAR, yaitu Jakarta, Tanjung Pinang, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, Kendari, Makassar, Sorong, Manado, Palembang, Surabaya, Balikpapan, Ambon, Kupang dan Merauke.
- c. SRU Darat : 3 (tiga) unit *Rescue Truck* disiagakan di Jakarta, Surabaya dan Denpasar, 24 *Rescue Car* disiagakan di kantor pusat dan seluruh kantor SAR kecuali kantor SAR Banda Aceh karena *Rescue Car*-nya masih dalam perbaikan akibat terkena bencana tsunami.

Dalam pelaksanaannya SRU tersebut di atas akan stand by dan melakukan patroli rutin di lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan di wilayah tanggung jawab SAR masing-masing. Setiap kantor SAR juga akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi/organisasi berpotensi SAR, baik pemerintah maupun swasta.

5. Pelayanan Badan Meteorologi dan Geofisika.
Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya pada masa angkutan lebaran tahun 2005, saat ini BMG telah memberikan Pelayanan Jasa Meteorologi (cuaca) dan geofisika (gempa) pada masyarakat melalui telepon seluler dengan menggunakan **Short Message Services (SMS)** dengan nomor : **2303** dengan mengetik yang diinginkan :

C1 Lokasi; Cuaca Lokasi; Iklim Lokasi; Gempa Lokasi;

6. Penggunaan *L3 Communications* untuk peningkatan sistem informasi dan pengendalian lalu lintas dan angkutan dengan pola manajemen krisis center.

C. Kondisi Darurat

Apabila diperlukan, kepada Panglima TNI dapat dimintakan bantuan alat angkutan baik alat angkutan darat (bus, truk), angkutan laut (kapal laut) dan angkutan udara (pesawat udara) sesuai kemampuan yang tersedia pada TNI.

VII. KESIAPAN PRASARANA

A. Moda Darat

1. Kondisi Ruas Jalan dan Jembatan

Berdasarkan hasil survai Tim lapangan Ditjen Perhubungan Darat, secara umum kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H) di Propinsi Lampung dan Pulau Jawa dalam kondisi baik dan sedang namun di beberapa ruas Jalan dalam kondisi rusak. Adapun kondisi prasarana Jalan dan jembatan di wilayah Propinsi Lampung dan Pulau Jawa adalah sebagai berikut :

a. Propinsi Lampung

- 1) Jalur Utama

Jalur Utama Angkutan lebaran sebagai jalur distribusi pergerakan barang dan penumpang pada masa Angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H) di Propinsi Lampung terbagi menjadi 4 (empat), yaitu :

- a) Jalur Bakauheni - Terbanggi Besar melalui Bakauheni - Kalianda - Panjang - Rajabasa - Tegineneng - Gunung Sugih - Bandar Jaya - Terbanggi Besar.
- b) Jalur Lintas Tengah Sumatera melalui Terbanggi Besar -

Kotabumi - Bukit Kemuning - Simpang Empat - Batas Sumsel.

- c) Jalur Lintas Timur Sumatera melalui Terbanggi Besar - Bujung Tenuk - Pematang Panggang (Batas Sumsel).
- d) Jalur Lintas Barat Sumatera melalui Tanjung Karang - Gd. Tataan - Kota Agung - Wonosobo - Bengkuntat - Krui - Batas Bengkulu.

Total Jalur Utama Angkutan Lebaran di Propinsi Lampung sepanjang 652,94 Km dengan kondisi sebagai berikut :

NO	RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KONDISI JALAN (Km)		
			BAIK	SEDANG	RUSAK
1.	Bakauheni – Terbanggi Besar	156	88	56	12
2.	Lintas Tengah Sumatera	166	65	63	37
3.	Lintas Timur Sumatera	130	41	59	30
4.	Lintas Barat Sumatera	281	134	108	79

2) Jalur Alternatif

Disamping jalur utama Angkutan lebaran 2005 (1426 H); telah disiapkan jalur alternatif yang dapat digunakan oleh pelaku perjalanan untuk mengalihkan arus lalu lintas dalam rangka membantu kelancaran arus lalu lintas di wilayah Propinsi Lampung, antara lain :

- a) Jalur Alternatif I (331,47 Km) :
Bakauheni – Gayam – Lb. Maringgai – Sukadana - Gedong Dalam – Gunung Sugih.
- b) Jalur Alternatif II (144,33 Km) :
 - (1) Sp. Pugung - Gd. Tataan - Pringsewu - Bandung Baru - Kalirejo - Sp. Kuripan/Pd. Ratu - Gunung Sugih.
 - (2) Sp. Pugung - Gd. Tataan - Pringsewu - Bandung Baru - Kalirejo - Pd. Ratu - Aji Keagungan.
- c) Jalur Alternatif lain yang dapat direkomendasikan apabila jembatan Way Sekampung dan jembatan Way Pangubuan ambruk.
 - (1) Gunung Sugih – Padang Ratu – Way Rarem – Aji Kagungan.
 - (2) Gunung Sugih – Kota Gajah – Gedong Dalam –

Purbalingga – Menggala.

3) Jembatan

Berdasarkan data dari Departemen Pekerjaan Umum, jumlah jembatan yang terdapat di Propinsi Lampung pada Jalan nasional sampai dengan tahun 2005 sebanyak 25 buah dimana umur jembatan yang lebih dari 20 tahun sebanyak 9 buah. Kondisi jembatan di Propinsi Lampung secara umum baik, namun ada 2 jembatan yang dalam kondisi rusak dan perlu mendapatkan perhatian penanganannya yaitu jembatan Way Sekampung dan jembatan Way Pangubuan. Adapun data jembatan pada Jalan nasional di Propinsi Lampung adalah sebagai berikut :

NO	RUAS JALAN	Jumlah Jembatan (≥ 60 m)	Jumlah Jembatan (≥ 20 thn)
1.	Tbg Besar - Bts Sumsel (Lintas Timur)	4	-
2.	Tbg Besar - Bts Sumsel (Lintas Tengah)	3	-
3.	Bd. Lampung – Bts Bengkulu	11	-
4.	Bd. Lampung – Terbanggi Besar	7	9

Disamping jembatan, pada ruas Bakauheni - Terbanggi Besar telah dibangun Fly Over pada 3 (tiga) titik perlintasan dengan jalan rel antara lain :

- a) Fly Over Panjang
- b) Fly Over Natar
- c) Fly Over Blambangan (Banjar Ratu)

b. Propinsi Banten

1) Jalur Utama

Jalur Utama Angkutan lebaran sebagai jalur distribusi pergerakan barang dan penumpang pada masa Angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H) di Propinsi Banten terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

- a) Ruas Jalan Jakarta – Merak

Kondisi ruas jalan Jakarta – Merak sepanjang 107 Km rata-rata dalam kondisi cukup baik/hotmix dengan rincian sebagai berikut :

NO	RUAS JALAN	PANJANG (Km)	KONDISI JALAN (Km)		
			BAIK	SEDANG	RUSAK
1.	Cilegon – Merak	12,50	8	2,5	2
2.	Serang – Cilegon	18,10	6,1	8	4
3.	Tangerang – Serang	66,11	6,1	45,11	6
4.	Batas DKI – Tangerang	7,31	15	2,31	-
5.	Pd. Pinang – Batas Bogor	9,21	5	2	2

b) Ruas Jalan Tol Jakarta – Merak

Kondisi Jalan Tol Jakarta – Merak sepanjang 90 Km secara umum dalam kondisi baik dan rusak ringan berupa adanya retakan-retakan pada permukaan jalan dan lubang jalan dan masih dalam tahap perbaikan

2) Jalur Alternatif

Disamping jalur utama Angkutan lebaran 2005 (1426 H), telah disiapkan jalur alternatif untuk mengalihkan arus lalu lintas dalam rangka membantu kelancaran arus lalu lintas di wilayah Propinsi Lampung, antara lain :

- a) Ruas Jalan Pelabuhan Merak – Suralaya – Bojonegara – Serdang sepanjang 35 Km (Tidak direkomendasikan sebagai jalur alternatif karena kondisi jalan rusak berat).
- b) Ruas Jalan Cilegon – Labuan – Pandeglang – Rangkasbitung – Batas Jabar (106 Km)
- c) Ruas Jalan Cikande – Rangkasbitung – Batas Jabar (61 Km).
- d) Ruas Jalan Serang – Palima – Ciomas – Padarincang – Cinangka/Anyer (51 Km)

c. **Propinsi Jawa Barat**

1) Jalur Utama

Jalur Utama Angkutan lebaran sebagai jalur distribusi pergerakan barang dan penumpang pada masa Angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H) di Propinsi Jawa Barat terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a) Jalan Tol Jakarta – Cikampek
- b) Jalur Pantai Utara melalui *Jakarta - Cikampek - Pamanukan - Indramayu - Jatibarang - Palimanan - Cirebon - Batas Jateng.*
- c) Jalur Tengah melalui *Sadang - Purwakarta - Cikalong Wetan - Bandung - Sumedang - Kadipaten - Palimanan.*
- d) Jalur Selatan melalui *Jakarta - Bogor - Cianjur - Padalarang - Bandung - Tasikmalaya - Ciamis - Banjar.*

e) Jalan Tol Jakarta – Cipularang.

Secara umum kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H) di Propinsi Jawa Barat dalam kondisi baik sedang dan mengalami peningkatan/penambahan kapasitas dibandingkan tahun sebelumnya. Di sepanjang Pamanukan - Lohbener sedang dilakukan perbaikan/peningkatan perkerasan jalan dengan beton konkrit dan direncanakan selesai sebelum masa penyelenggaraan Angkutan lebaran.

2) Jalur alternatif

Jalur alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi beban lalu lintas pada jalur utama angkutan lebaran di Propinsi Jawa Barat antara lain :

a) Arah Jakarta ke Bandung

- (1) Jakarta - Tol Jagorawi - Puncak - Cianjur - Bandung.
- (2) Jakarta - Tol Jagorawi - Ciawi - Sukabumi - Bandung.
- (3) Jakarta - Tol Jagorawi - Cibubur - Jonggol - Cianjur - Bandung.
- (4) Jakarta - Tol Cipularang - Bandung

b) Purwakarta - Wanayasa - Jalan Cagak - Cimalaka (Sumedang).

c) Pamanukan - Subang - Jalan Cagak - Bandung.

d) Malangbong - Wado - Sumedang.

e) Sumedang - Kadipaten - Jatitujuh - Jatibarang.

f) Ciamis - Kawali - Cikijing - Kuningan - Cilimus - Cirebon.

d. **Propinsi Jawa Tengah**

1) Jalur Utama

Jalur Utama Angkutan lebaran sebagai jalur distribusi pergerakan barang dan penumpang pada masa Angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H) di Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

a) Jalur Pantura ; *Ruas jalan Losari/Pejagan - Brebes - Tegal - Pemalang - Pekalongan - Batang - Kendal - Semarang.*

b) Jalur Tengah ;

- (1) *Ruas Jalan Tegal - Prupuk - Bumiayu - Purwokerto.*
- (2) *Ruas jalan Semarang - Ungaran - Bawen - Ambarawa - Magelang - Yogyakarta.*
- (3) *Ruas jalan Purwokerto - Purbalingga - Banjarnegara - Wonosobo - Temanggung - Salatiga - Boyolali - Solo.*

- c) Jalur Selatan ; *Ruas jalan Batas Jawa Barat - Wangon - Banyumas - Kebumen - Purworejo - Yogyakarta.*

Secara umum kondisi prasarana jalan dan jembatan pada jalur angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H) di Propinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik sedang. Di sepanjang Jalur Pantura sedang dilakukan pekerjaan perbaikan/peningkatan ruas Jalan, jembatan dan overlay yang direncanakan selesai dan siap digunakan pada penyelenggaraan Angkutan lebaran.

3) Jalur alternatif

Jalur alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi beban lalu lintas pada jalur utama angkutan lebaran di Propinsi Jawa Barat antara lain :

- a) Pejagan - Ketanggungan - Prupuk.
- b) Pemalang - Purbalingga
- c) Weleri - Parakan - Temanggung.

2. Distribusi lalu lintas arus mudik dan balik periode Angkutan Lebaran 2005/1426 H

- a. Berdasarkan hasil perhitungan lalu lintas tahun 2004 pada masa pelayanan Angkutan Lebaran 2004/1426 H diketahui arus lalu lintas :

- 1) Arus mudik :
 - a) Sepeda motor : 422.801 kendaraan
 - b) Selain sepeda motor : 631.044 kendaraan
- 2) Arus Balik :
 - a) Sepeda motor : 326.224 kendaraan
 - b) Selain sepeda motor : 521.778 kendaraan
- 3) Arus Total Penyelenggaraan Lebaran 2004/1425 H :
 - a) Sepeda motor : 749.025 kendaraan
 - b) Selain sepeda motor : 1.152.822 kendaraan

- b. Dengan dioperasikannya Tol Cipularang, diprediksi pada pelaksanaan Angkutan Lebaran 2005/1426 H terjadi pergeseran arus lalu lintas pengguna kendaraan bermotor yang semula menggunakan jalur Ciawi (Sukabumi dan Cisarua) menuju jalur selatan akan beralih menggunakan Tol Cipularang. Dari data yang diperoleh dari PT. Jasa Marga (Persero), dengan beroperasinya Tol Cipularang, terjadi peningkatan arus lalu lintas antara lain di :

- 1) Pintu Tol Cikopo : naik 6 %

- 2) Pintu Tol Cileunyi : naik 15%
- 3) Pintu Tol Ciawi : turun 3,5%
- c. Pada penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2005/1426 H ini, dengan berdasarkan pada hasil pemantauan di Pintu Tol Cikopo, Tol Ciluenyi dan Tol Ciawi diprediksikan, prediksi arus lalu lintas untuk kendaraan selain sepeda motor yaitu :
- Arus Mudik : 655.933 kend.
 - Arus Balik : 543.878 kend.

Atau secara keseluruhan arus lalu lintas pada masa Angkutan Lebaran 2005/1426 H akan mengalami peningkatan sebesar **4,08%**.

- d. Sedangkan untuk arus kendaraan jenis sepeda motor diperkirakan akan mengalami peningkatan sebesar **4,303%** dari tahun sebelumnya :

Periode	2004/1425 H	2005/1426 H*)	%
Arus mudik	422.804	449.101	6,221
Arus balik	326.224	332.151	1,817
Total	749.029	781.252	4,303

Keterangan :

* Prediksi arus lalu lintas pada lebaran tahun 2005 (1426 H)

3. Terminal

Terminal Bus yang dipersiapkan di 8 propinsi dengan pengendalian terpadu berjumlah 29 terminal bus utama dan 11 terminal bus bantuan.

NO	PROPINSI	TERMINAL UTAMA	TERMINAL BANTUAN
1	2	3	4
1.	LAMPUNG	Rajabasa	St. DAMRI Bd. Lampung

NO	PROPINSI	TERMINAL UTAMA	TERMINAL BANTUAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2.	DKI JAKARTA	1) Lebakbulus 2) Kalideres 3) Pulogadung 4) Kp. Rambutan	1) Rawamangun 2) Tanjung Priok 3) Grogol 4) St. DAMRI Kemayoran 5) Muara Angke 6) Tanah Merdeka 7) Pinang Ranti 8) Rawabuaya 9) Kapten Tendean 10) Pool bus
3.	JAWA BARAT	1) Baranangsiang 2) Bekasi 3) Leuwi Panjang 4) Cicaheum 5) Cileunyi* 6) Harjamukti 7) Banjar 8) Depok 9) Cilembang 10) Garut	-
4.	BANTEN	1) Merak 2) Pakupatan	-
5.	JAWA TENGAH	1) Tegal 2) Purwokerto 3) Terboyo 4) Tirtonadi	-
6.	DI YOGYAKARTA	1) Giwangan 2) Jombor 3) Wonosari	-
7.	JAWA TIMUR	1). Osowilangun 2). Bungurasih 3). Madiun 4). Malang	-
8.	BALI	Ubung	-
JUMLAH		28	10

4. Jaringan jalan dan jembatan kereta api serta kelengkapan keselamatannya seperti sinyal dan telekomunikasi sedang dipersiapkan untuk menampung melonjaknya frekuensi perjalanan kereta api. Disamping itu telah dipersiapkan 64 stasiun di 9 Daop yang siap untuk

dilakukan pengendalian secara terpadu yaitu : Daop I DKI Jakarta, Daop II Bandung, Daop III Cirebon, Daop IV Semarang, Daop V Purwokerto, Daop VI Yogyakarta, Daop II Madiun, Daop VIII Surabaya dan Daop IX Jember.

No.	DATA SARANA	REALISASI		
		2003 1424 H	2004 1425 H	2005 1426 H
1.	KA Reguler	207	205	209
2.	Tambahan KA Lebaran	14	13	12
	Total KA Lebaran	221	218	221
3.	Lokomotif Siap Operasi	226	204	204
4.	KA pnp siap operasi	1.124	1.150	1.216
5.	Tempat duduk (reguler)	106.604	115.116	117.931
6.	Tempat duduk (+ Lebaran)	127.862	125.278	133.692
7.	Rata-rata pnp/hari	118.659	114.217	115.458

5. Lintasan Penyeberangan yang dipersiapkan berjumlah 7 lintasan namun untuk pemantauan terkait dengan Posko Terpadu, pemantauan hanya dilakukan pada 5 (lima) lintas penyeberangan yaitu : Lintas Merak-Bakauheni, Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, Padangbai-Lembar dan Khayangan-Pototano sedangkan untuk 2 (dua) lintas penyeberangan lainnya yaitu lintasan Palembang-Muntok dan Bajo'e-Kolaka, data pergerakan akan dipantau oleh Direktorat ASDP.

Jumlah dermaga dan fasilitas penunjang, yang tersedia pada 7 (tujuh) lintas penyeberangan adalah sebagai berikut :

No.	Rute Penyeberangan	Jumlah Dermaga	Fasilitas Dermaga
1.	Merak - Bakauheni	4 untuk Kp. Ro-ro 1 untuk Kp. Cepat	Movable Bridge, Gangway, Elevated Side Ramp, dll.
2.	Ujung - Kamal	3 untuk Kp. Ro-ro 1 untuk Kp. Beaching	Movable Bridge, Gangway, Terminal, dll.
3.	Ketapang - Gilimanuk	2 untuk Ro-ro 1 untuk Kp. Beaching 1 Dermaga Ponton	Movable Bridge, Ponton, Gangway, Terminal, dll.
4.	Padangbai - Lembar	1 untuk Kp. Ro-ro	Movable Bridge, Terminal, dll.
5.	Khayangan - Pototano	1 untuk Kp. Ro-ro	Movable Bridge, Terminal, dll.

6.	Palembang - Muntok	1 untuk Kp. Ro-ro	Movable Bridge, Ponton, Terminal, dll.
7.	Bajo'e - Kolaka	1 untuk Kp. Ro-ro	Movable Bridge, Beaching, Terminal, dll.

B. Moda Laut

Terdapat 50 pelabuhan yang akan dilakukan pemantauan/pengendalian terpadu di seluruh Indonesia yaitu : Belawan, Sibolga, Tg. Balai Asahan, Dumai, Pekanbaru, Sei Pakning, Kendari, Selat Panjang, Tg. Balai Karimun, Batam, Tg. Batu, Tg. Uban, Tg. Pinang, Sei Kolak Kijang, Tg. Pandan, Pkl. Balam/Bliny, Jambi/Kuala Tungkal, Palembang, Teluk Bayur, Sunda Kelapa, Tg. Priok, Benoa, Tg. Mas, Gresik, Tg. Perak, Pontianak, Kumai, Sampit, Banjarmasin, Batu Licin, Balikpapan, Samarinda, Tarakan, Nunukan, Makasar, Pare – Pare, Pantoloan, Bitung, Gorontalo, Tual, Bau – Bau, Siwa, Lembar, Kupang, Ternate, Ambon, Jayapura, Biak, Sorong, Merauke.

C. Moda Udara

Pengendalian akan dikendalikan secara terpadu pada 20 bandar udara di seluruh Indonesia yaitu : Soekarno Hatta (Jakarta), Juanda (Surabaya), Hasannudin (Makasar), Polonia (Medan), Ngurah Rai (Denpasar), Samsuddin Noer (Banjarmasin), Sepinggan (Balikpapan), Ahmad Yani (Semarang), Juwata (Tarakan), El Tari (Kupang), Adi Soetjipto (Yogyakarta), Sultan Syarif Kasim II (Pekanbaru), Supadio (Pontianak), Hang Nadim (Batam), Minangkabau (Padang), Depati Amir (Pangkal Pinang), Adi Soemarmo (Solo), Sam Ratulangi (Manado), Selaparang (Mataram).

VIII. KEBIJAKSANAAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LEBARAN.

Meningkatkan kualitas keselamatan dan pelayanan kepada masyarakat dalam suasana serba keterbatasan serta melaksanakan penyelenggaraan angkutan lebaran 2005 (1426 H) secara tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat melalui berbagai upaya sebagai berikut :

A. Umum.

1. Mengutamakan faktor keselamatan dan kelancaran lalu lintas darat, laut dan udara serta keterpaduan intra dan antar moda;
2. Melakukan sosialisasi dan publikasi atas seluruh kebijaksanaan dan pengaturan angkutan lebaran 2005 (1426 H) kepada seluruh lapisan masyarakat, operator angkutan dan petugas pelaksana, berupa penyebaran peta resmi jalur lebaran kepada para pemudik, pemasangan spanduk sosialisasi dan publikasi di sepanjang jalur lebaran.

3. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan publikasi melalui media cetak, elektronik maupun jaringan informasi lainnya secara intens yang mencakup kesiapan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, dan udara) danantisipasi permasalahan-permasalahan menonjol yang mungkin terjadi.
4. Dengan mengutamakan faktor keselamatan, dilakukan optimasi daya angkut sarana angkutan penumpang umum dengan memberikan dispensasi muatan **10%** di atas ketentuan yang berlaku untuk bus, **60%** untuk kereta api kelas ekonomi dan **30 %** untuk kereta api kelas bisnis dan **30%** untuk kapal ferry penyeberangan.
5. Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi angkutan lebaran 2005 (1426 H) yang lebih cepat dan akurat dengan penggunaan CCTV dan website : www.hubdat.go.id.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar sektor terkait.
7. Meningkatkan penertiban, pengaturan, pengamanan dan pengawasan secara terkoordinasi dalam penyelenggaraan angkutan lebaran.
8. Harga tarif angkutan darat, laut dan udara dicantumkan secara jelas di loket sedangkan untuk angkutan darat khususnya bus umum tarif angkutan dicantumkan dengan jelas di dalam bus.

B. Transportasi Darat.

1. Dalam rangka peningkatan kelancaran arus lalu lintas di sepanjang jalur lebaran di pulau Jawa, maka dilakukan rekayasa dan manajemen lalu lintas di jalan dengan dikeluarkannya Instruksi Dirjen Perhubungan Darat tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengoperasian Angkutan Barang pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H), yang antara lain berisi :
 - a). Melakukan pengendalian dan pengaturan arus lalu lintas yang melalui ruas jalur Pantai Utara dan yang melalui jalur Selatan (khususnya yang melintasi Tol Cipularang) dari arah Barat (Jakarta) ke Timur secara proporsional pembebanan volume lalu lintas pada kedua ruas jalur tersebut.
 - b). Melakukan pengendalian dan pengaturan arus lalu lintas secara dinamis dan situasional (tidak permanen) terhadap kendaraan angkutan penumpang tidak umum dan kendaraan angkutan barang di ruas jalan Pantura khususnya dari arah Timur ke Barat (menuju Jakarta) pada masa angkutan lebaran mulai tanggal 27 Oktober 2005 (H-7) s/d tanggal 11 Nopember 2005 (H+7).

- c). Pengendalian dan pengaturan arus lalu lintas dilakukan dengan cara yaitu apabila telah terjadi peningkatan densitas yang tinggi (kecepatan rendah/ arus lalu lintas mendekati delay atau macet) arus lalu lintas dari Barat ke Timur pada saat mudik maka dilakukan pengalihan arus dari Timur ke Barat di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah atau dengan pengaturan buka tutup sesuai dengan kondisi lalu lintas di lapangan.
 - d). Melakukan pengaturan lalu lintas berupa pelarangan dioperasikannya truk pengangkut bahan bangunan dan truk bersumbu lebih dari 2 (dua), truk tempelan, truk gandengan dan kontainer mulai tanggal 30 Oktober 2005 (H-4) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 3 November 2005 (H1) pukul 24.00 WIB di Pulau Jawa, kecuali untuk angkutan BBM, ternak, bahan pokok (beras, gula pasir, terigu, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam dan telur), pupuk, susu murni dan barang antaran pos.
 - e). Khusus untuk pengangkutan barang-barang ekspor/impur dengan kontainer yang menuju/dari pelabuhan ekspor Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Tanjung Mas serta sebaliknya dapat diberikan dispensasi, pengaturannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan/DLLAJ Propinsi dengan pengaturan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada jalur utama Angkutan Lebaran 2005/1426 H.
 - f). Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi di Wilayah Propinsi Lampung, Pulau Jawa dan Bali untuk menutup pengoperasian seluruh jembatan timbang mulai tanggal 27 Oktober 2005 (H-7) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 11 November 2005 (H+7)) pukul 24.00 WIB.
2. Dikeluarkan Instruksi Dirjen Perhubungan Darat tentang Pengaturan Penggunaan Sepeda Motor sebagai Sarana Angkutan pada masa Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H) yang mengatur tentang pelaksanaan pengaturan/pengawasan penggunaan sepeda motor selama masa angkutan lebaran 2005 (1426 H) untuk moda angkutan jalan mulai tanggal 27 Oktober 2005 (H-7) pukul 00.00 WIB s/d tanggal 11 Nopember 2004 (H+7) pukul 24. 00 WIB sebagaimana berikut :
- a) Setiap sepeda motor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b) Setiap pengendara sepeda motor baik pengemudi maupun penumpang wajib menggunakan helm;
 - c) Melarang penggunaan sepeda motor dengan kereta samping ataupun

- d) Cara penempatan barang tidak boleh melebihi lebar kemudi, agar keseimbangan berkendara tetap terjaga dan tidak mengganggu arus lalu lintas dan pengguna jalan lainnya;
 - e) Setiap sepeda motor hanya diperkenankan mengangkut 2 orang penumpang, termasuk anak-anak;
 - f) Setiap pengendara sepeda motor wajib menjaga jarak aman saat berjalan beriringan dan tidak diperkenankan untuk berjalan berdampingan kecuali dalam keadaan/kondisi khusus, dengan kecepatan maksimum 80 km/jam;
 - g) Menggunakan jalur lambat, jika tidak memungkinkan atau tidak tersedia jalur lambat dapat menggunakan jalur utama pada lajur paling kiri;
 - h) Untuk keselamatan, kepada pengendara sepeda motor dihimbau untuk menggunakan lampu utama dekat ketika dalam perjalanan walaupun siang hari;
3. Kepada para petugas terminal, dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan peralatan tanggap darurat untuk setiap bus yang hendak berangkat sebagai salah satu upaya peningkatan keselamatan penumpang.
 4. Selama masa Angkutan Lebaran 2005 (1426 H) agar dihindarkan segala bentuk kegiatan yang dapat menghambat kelancaran arus lalu lintas lebaran. Bus angkutan lebaran bergerak langsung menuju ke kota tujuan dan hanya berhenti di Terminal Bus sesuai dengan Kartu Pengawasan.

C. Transportasi Laut.

1. Memberikan prioritas pelayanan sandar kapal penumpang dan hewan serta kapal pengangkut bahan pokok (beras dan gula).
2. Memberikan dispensasi secara selektif terhadap kapal barang untuk mengangkut penumpang sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan kewaspadaan, kelancaran, ketertiban, keamanan & keselamatan prasarana & sarana transportasi laut.
4. Memberikan dispensasi kelebihan penumpang sesuai ketentuan keselamatan pelayaran.
5. Meminta dukungan pengoperasian kapal TNI AL dlm rangka mengatasi kekurangan kapasitas kapal berdasarkan kebutuhan yg nyata.

D. Transportasi Udara.

1. Menyiapkan secara maksimal prasarana dan sarana angkutan udara.
2. Mengatur dan menertibkan angkutan lebaran supaya lancar, aman, tertib, tepat waktu dan nyaman.
3. Meningkatkan keselamatan penerbangan dan meningkatkan pengawasan.
4. Meningkatkan keamanan dan ketenangan penumpang dalam perjalanan.

E. Pos dan Telekomunikasi.

1. Meningkatkan layanan jasa pos antara lain dengan :
 - a. Menyediakan loket/tempat khusus di beberapa gedung perkantoran besar yang menyediakan kartu lebaran dan sekaligus berfungsi sebagai tempat penerimaan/pengiriman kartu lebaran, yang diberi nama "Pojok Lebaran".
 - b. Mempekerjakan karyawan lepas yang berasal dari para pensiunan pos dan pelajar untuk melayani lonjakan produksi jasa pos.
 - c. Menyediakan sarana dan fasilitas tambahan pelayanan pos.
2. Melakukan pengamanan Sistem Komunikasi Angkutan Lebaran 2005 (1426 H) dengan melaksanakan monitoring spektrum frekuensi radio.

F. Badan SAR Nasional

1. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2005 Basarnas secara umum disesuaikan dengan kebijakan Menteri Perhubungan.
2. Penanganan operasi SAR baik untuk musibah pelayaran, penerbangan maupun musibah/bencana lainnya, dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi yang berlaku.
3. Prosedur bantuan untuk operasi SAR terhadap bencana dan musibah transportasi darat/kereta api, dilaksanakan dengan memperbantukan unit SAR pada SATLAK PB untuk bencana alam dan unit LLAJ/ PT. KAI bersama dengan potensi SAR lainnya.

IX. PENGATURAN DAN PENGENDALIAN

A. Umum

1. Menyediakan, menyelenggarakan, mengamankan dan mengatur arus lalu lintas dan angkutan darat, laut dan udara serta mengupayakan keselamatan selama perjalanan dari Jakarta dan kota – kota lainnya ke tempat tujuan dengan tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan angkutan lebaran dilaksanakan berlandaskan prinsip keterpaduan antar angkutan darat, laut dan udara, didukung oleh seluruh sub sektor perhubungan terkait.
3. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelayanan Pos dan Telekomunikasi bagi masyarakat, serta bagi dukungan penyelenggaraan angkutan lebaran.
4. Di setiap Propinsi, oleh Gubernur dibentuk Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Propinsi terdiri dari berbagai unsur terkait serta mengikutsertakan potensi masyarakat.
5. Di setiap Kabupaten/Kota, oleh Bupati/Walikota dibentuk Satuan Tugas Tim Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tingkat Kabupaten Kota yang terdiri dari berbagai unsur terkait serta mengikutsertakan potensi masyarakat.
6. Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal, bekerjasama YLKI akan dilakukan pemantauan terhadap pelayanan jasa angkutan dengan menampung keluhan-keluhan masyarakat.
7. Dengan koordinasi dengan aparat keamanan secara intensif akan dilakukan upaya-upaya untuk pengendalian/pencegahan terjadinya percaloan.

B. Transportasi Darat.

1. Melihat posisi DKI Jakarta sebagai pusat penyebaran pemudik, maka arus lalu lintas kendaraan penumpang dari Jakarta bergerak menuju tiga jurusan utama dengan menggunakan angkutan jalan baik jalan bebas hambatan (Tol) maupun jalan umum, dan lintas penyeberangan sebagai berikut :
 - a. Arah Timur melalui jalur Pantura (Jakarta - Cikampek -Pamanukan - Cirebon - Tegal - Pekalongan - Semarang).

- b. Arah Selatan menuju jalur Selatan (Jakarta - Bandung - Ciamis - Wangon - Kebumen - Yogyakarta - Solo).
 - c. Arah Barat menuju Merak - Bakauheni (Sumatera).
2. Kendaraan angkutan penumpang tidak umum dan angkutan barang dari arah Timur ke arah Barat menuju Jakarta apabila dilakukan pengalihan arus lalu lintas melalui jalur utama lain ataupun jalur alternatif:

a. **Jalur utama** :

1) **Dari arah Jawa Timur dan Jawa Tengah**

- a) Semarang–Bawen–Magelang–Purworejo-
- b) Solo– Yogyakarta – Purworejo – melalui Kebumen – Wangon – *Majenang* – Banjar – Ciamis – Tasikmalaya – Malangbong – *Cileunyi* – Bandung :
 - *Jalan Tol Cipularang* – jalan tol Cikampek – Jakarta atau
 - *Jalur Puncak (Padalarang – Cianjur – Bogor) – Jakarta.*

2) **Dari arah Tegal menuju Jakarta,**

- melalui Tegal – Slawi – *Prupuk* – *Bumiayu* - Ajibarang – Wangon – *Majenang* - Banjar – Ciamis – Tasikmalaya –Malangbong – *Cileunyi* – Bandung :
- *Jalan Tol Cipularang* – jalan tol Cikampek – Jakarta atau
 - *Jalur Puncak (Padalarang – Cianjur – Bogor) – Jakarta.*

3) **Dari arah Cirebon menuju Jakarta,**

- melalui Cirebon –Kuningan – Cikijing – Ciamis – Tasikmalaya – Malangbong – *Cileunyi* – Bandung:
- *Jalan Tol Cipularang* – jalan tol *Cikampek* – Jakarta atau
 - *Jalur Puncak (Padalarang – Cianjur – Bogor) – Jakarta.*

b. **Jalur alternatif** :

Slawi – Ketanggungan – Ciledug – Kuningan – Cikijing - Majalengka meliputi :

1) Kadipaten – Sumedang – Bandung :

- Padalarang – Plered – Purwakarta – jalan tol Cikampek – Jakarta atau ;
- Jalan Tol Cipularang – Jalan Tol Cikampek – Jakarta atau ;
- *Jalur Puncak (Padalarang – Cianjur – Bogor) – Jakarta.*

- 2) Kadipaten – Cijelag – Sumedang – Jalan Cagak –Subang – Sadang – jalan tol Cikampek –Jakarta;
 - 3) Kadipaten – Cijelag – Subang – Sadang – jalan tol Cikampek – Jakarta.
3. Khusus kemacetan lalu lintas pada ruas Cikampek-Pamanukan-Jatibarang-Palimanan dapat diberlakukan pengaturan lalu lintas oleh petugas dengan memanfaatkan jalur alternatif :
- a. Palimanan – Kadipaten – Cijelag – Subang – Sadang - Cikampek;
 - b. Jatibarang – Jatitujuh – Kadipaten – Cijelag – Subang - Sadang – Cikampek;
 - c. Pamanukan – Pagadenbaru – Subang – Sadang – Cikampek
4. Pada setiap Ibukota Propinsi agar dilakukan pemantauan dan pengaturan pergerakan pemudik yang keluar/masuk selama periode Angkutan Lebaran 2005 (1426 H) baik di ruas jalan maupun di Terminal-terminal utama maupun bantuan.
5. Untuk menghindari penumpukkan arus lalu lintas pada lokasi-lokasi yang rawan terjadinya kemacetan dan bencana alam akan dikembangkan pola pengendalian arus lalu lintas menggunakan sistem Zona. Pengendalian arus lalu lintas dilakukan oleh petugas yang tergabung dalam *Tim Mobile* dengan pembagian zona dan lokasi-lokasi rawan sebagai berikut :
- 1) ZONA I : CILEGON, SERANG, MERAK
Lokasi - lokasi :
 - a) Penyeberangan Merak – Bakauheni
 - b) Jalan Alternatif Merak – Bojonegara – Serang Timur
 - c) Ujung Fly Over Merak
 - d) Simpang Gerem
 - e) Jalur wisata Serang – Anyer
 - f) Terminal Merak
 - g) Persimpangan Cilegon (Gerem) – Merak
 - 2) ZONA II : KARAWANG, PURWAKARTA DAN SUBANG
Lokasi-lokasi :
 - a) Ujung Tol Cikopo
 - b) Simpang Jomin
 - c) Simpang Sadang (terdapat pembangunan mall)
 - d) Jalur Alternatif Sadang – Subang – Pamanukan
 - e) Jalur Wisata Ciater/Tangkubanperahu – Lembang

- f) Pasar Sukamandi, Sukra
 - g) Pasar Ciasem
- 3) ZONA III : INDRAMAYU, CIREBON DAN MAJALENGKA
Lokasi-lokasi :
- a) Pasar Patrol
 - b) Pasar Gebang
 - c) Pasar Kandanghaur
 - d) Pasar Tegalgubug
 - e) Pasar Karang Ampel
 - f) Pasar Kertasemaya
 - g) Pasar Bulak Kamba
 - h) Simpang Lohbener
 - i) Simpang Kadipaten
 - j) Simpang Cijelag
 - k) Jalur Alternatif Subang – Cikamurang – Cijelag
 - l) Jalur Alternatif Kadipaten – Jatitujuh – Jatibarang
 - m) Terminal Cirebon
- 4) ZONA IV : BOGOR, CIANJUR DAN SUKABUMI
Lokasi-lokasi :
- a) Jalur Alternatif Jonggol – Cianjur
 - b) Jalur Wisata Puncak
 - c) Jalur Alternatif Ciawi – Sukabumi – Cianjur
 - d) Pasar Caringin, Cicurug, Cibadak
 - e) Simpang Ciawi
- 5) ZONA V : BANDUNG, SUMEDANG DAN GARUT
Lokasi-lokasi :
- a) Pasar Padalarang
 - b) Ruas Sumedang – Cileunyi (Cadas Pangeran)
 - c) Simpang – Cileunyi
 - d) Pasar Pabrik Kahate dan sekitarnya
 - e) Ruas Cileunyi – Nagrek
 - f) Perlintasan Sebidang Cicalengka dan Nagrek
 - g) Jalur Alternatif Wado – Malangbong
 - h) Ruas Jalan Ciamis – Kawali terdapat gorong-gorong yang rusak di Km. 125+600, 129+500, 140+000, 166++000 Bandung
 - i) Daerah rawan longsor pada ruas jalan Ciamis – Kawali km 148 Bandung atau 4 Kawali
 - j) Tanah Longsor di Km. 165+200 Bandung dalam kondisi parah dan belum mendapatkan penanganan

6) ZONA VI : BREBES, TEGAL DAN BUMIAYU

Lokasi-lokasi :

- a) Pasar Surodadi antara Pemalang – Tegal.
- b) Ruas Jalan Tegal – Pekalongan Km. 13.6 (Tegal) atau Km. 15.4 (Pemalang) terdapat bottle neck karena rehabilitasi jembatan
- c) Jalur Alternatif Tanjung – Ketanggungan – Prupuk
- d) Pada km 12 Ketanggungan, terdapat pasar larangan yang berpotensi menyebabkan kemacetan.
- e) Perlintasan Sebidang berpintu 53 Prupuk pada pertigaan Cirebon – Tegal – Prupuk
- f) Perlintasan sebidang berpintu 293 Karang Sawah – Prupuk
- g) Pada pertigaan jalan lingkaran Bumiayu dari arah Purwokerto, terdapat terminal yang telah melebihi kapasitas, sehingga banyak kendaraan angkutan umum yang ngetem di pertigaan.
- h) Ruas Bumiayu – Ajibarang – Wangon (Rawan Longsor)
- i) Pada km 9 – 18 Prupuk, kondisi ruas jalan Prupuk – Bumiayu rusak sedang pada permukaan, sisi kiri dan sisi kanan jalan.
- j) Km. 14 Tegal ruas jalan Tegal – Pekalongan (dari 4 lajur/ 2 jalur menjadi 2 lajur 2 jalur sepanjang 10 km)

7) ZONA VII : BANYUMAS, KEBUMEN, PURWOREJO

Lokasi-lokasi :

- a) Hambatan Keluar/Masuk Kendaraan Ke SPBU dan rumah makan
- b) Ruas Kebumen – Gombong (Rawan Banjir)
- c) Perlintasan sebidang sampiyuh
- d) Perlintasan sebidang buntu
- e) Daerah rawan longsor Bumiayu - Ajibarang

8) Posko Terminal

Arus Mudik : - Terminal Pulogadung
- Terminal Kampung Rambutan
- Terminal Kalideres
- Terminal Lebak Bulus
- Terminal Tanjung Priok
- Terminal Merak

Arus Balik : - Terminal Solo
- Terminal Yogyakarta
- Terminal Purwokerto
- Terminal Tegal
- Terminal Merak

6. Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan pokok, yaitu Kegiatan Pemberangkatan (Arus Mudik), Kegiatan Pengamanan dan Pengaturan lalu lintas dan angkutan sepanjang jalur lebaran serta Kegiatan Arus Balik.

a. Kegiatan Pemberangkatan.

- 1) Penyelenggaraan dan pengaturan pemberangkatan diarahkan untuk mendorong masyarakat melaksanakan mudik lebaran secara tidak bersamaan.
- 2) Mendorong dan mengembangkan agar perusahaan swasta dapat menyediakan angkutan mudik gratis (sistem charter), hal ini sangat membantu pemudik serta dapat mengurangi kepadatan karena diberangkatkan sebelum periode puncak.
- 3) Mendorong manajemen perusahaan swasta untuk memberikan THR secara dini kepada para pekerja dan pegawai sehingga dapat memanfaatkan kebijakan mudik tidak secara bersamaan.
- 4) Khusus untuk angkutan jalan agar ditingkatkan pengaturan kelancaran lalu lintas kendaraan di tempat-tempat rawan kemacetan, rawan kecelakaan, rawan bencana alam di sepanjang jalur lebaran.
- 5) Untuk kesiapan sarana dalam rangka peningkatan keselamatan dilakukan pemeriksaan kelaikan jalan terhadap armada yang akan diberangkatkan baik di terminal-terminal maupun di pool armada.
- 6) Peningkatan antisipasi terhadap arus puncak Lebaran yang biasanya terjadi antara H - 3 s/d H - 1, sehingga dapat mengurangi dampak negatif yang timbul sejalan dengan kebijaksanaan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

b. Kegiatan Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Sepanjang Jalur Lebaran.

Penyelenggaraan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan di sepanjang jalur angkutan lebaran, di simpul – simpul lalu lintas dan angkutan baik di DKI Jakarta maupun kota – kota lainnya perlu mendapat perhatian untuk terwujudnya kondisi lalu lintas dan angkutan sepanjang perjalanan secara lebih tertib, cepat, lancar, aman, nyaman dan selamat. Simpul – simpul lalu lintas dan angkutan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- 1) Terminal Penyeberangan Merak – Bakauheni.

- (a) Peningkatan pengaturan kelancaran serta ketertiban arus lalu lintas penumpang dan kendaraan, mulai dari masuk terminal, masuk dan keluar Ferry maupun kapal laut (dengan peningkatan fasilitas rambu/informasi lainnya) guna menjamin kelancaran dan keselamatan penyeberangan dan pelayaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (b) Koordinasi dengan POLRI dan instansi terkait setempat dalam pengaturan dan pengamanan pemberangkatan kendaraan dari lokasi penampungan/ kantong-kantong parkir menuju dermaga, pengaturan kendaraan umum dan pribadi serta truk yang mengangkut bahan-bahan tertentu yang harus mendapat prioritas penyeberangan.
- (c) Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh aparat terkait secara terpadu di bawah koordinasi Kepala Cabang PT (Persero) ASDP dan atau pejabat yang ditunjuk. Pengaturan jumlah trip untuk kapal ferry maupun kapal cepat disesuaikan dengan kebutuhan dan bila diperlukan bantuan angkutan penyeberangan berupa kapal TNI-AL dan atau kapal bantuan lainnya dengan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli masyarakat.

2) Gerbang Tol Cikopo/Cikampek.

Pengaturan kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus lalu lintas kendaraan pada ruas jalan Jomin – Cikopo – Sadang guna mencegah kemungkinan terjadinya konflik lalu lintas di pertigaan Cikopo dan Sadang antara kendaraan yang bergerak dari arah yang berlawanan. ***Untuk monitoring tol Cikopo ini akan dilengkapi dengan peralatan CCTV.***

- (a) Diperlukan penambahan gerbang tol secara seri untuk pembayaran Tol dan penambahan petugas Jasa Marga untuk membagikan tiket masuk tol, sesuai dengan kebutuhan serta langkah-langkah manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan.
- (b) Pengalihan arus lalu lintas melalui Gerbang tol Kahuripan dan atau Gerbang tol Karawang Timur dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

3) Jalan Tol Cipularang

Sebagai akibat dari pelimpahan arus lalu lintas Tol Cipularang akan berakibat terjadinya antrian yang cukup panjang di

persimpang Sukajadi hingga Flyover Pasopati.

4) Jalan Tol Arjawinangun - Plumbon - Ciperna Cirebon.

- (a) Pengaturan kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di gerbang tol Arjawinangun, sepanjang ruas jalan tol Arjawinangun - Ciperna dan di ujung tol Ciperna serta perlintasan sebidang jalur kereta api menjelang Cirebon.
- (b) Pengaturan kelancaran arus lalu lintas yang melintasi simpang Palimanan yang menjadi titik rawan kemacetan.

5) Kawasan Arjawinangun - Jatibarang - Karang Ampel - Cirebon.

Pengantisipasi kemacetan ruas jalan Jatibarang - Arjawinangun perlu pengaturan pengalihan arus lalu lintas ke ruas jalan Jatibarang - Karang Ampel - Cirebon.

6) Persimpangan Pejagan (Losari).

Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas di simpang Pejagan sebagai titik penyebaran arus lalu lintas menuju Semarang dan menuju Purwokerto melalui Ketanggungan dan ke arah Kuningan melalui Ciledug.

7) Jalan Tol Padalarang - Cileunyi.

(a) Ujung Tol Padalarang

Pengaturan dan penertiban arus lalu lintas di wilayah Padalarang yang disebabkan adanya pertemuan arus lalu lintas dari arah Cianjur dan Purwakarta serta Bandung. Diperlukan penambahan Gerbang tol secara seri untuk pembayaran tol dan penambahan petugas PT. Jasa Marga (Persero) guna membagikan tiket masuk tol sesuai dengan kebutuhan.

(b) Ujung Tol Cileunyi.

Hal-hal yang diperlukan dalam menangani permasalahan di persimpangan Cileunyi untuk mengurangi antrian kendaraan antara lain sebagai berikut :

- (1) Fungsi APILL dapat dihidupkan kembali dengan terlebih dahulu mengubah desain geometric persimpangan, khususnya median masuk mulut persimpangan dari arah Kabupaten Sumedang diperpendek 8 meter dan dari arah Tasikmalaya diperpendek 5 meter dan dibuat pulau lalu lintas.

- (2) Mengganti APILL system manual dengan setting arus yang sama menjadi APILL System Digital yang disetting dengan siklus optimum dan minimum delay terhadap waktu jam sibuk tiap kaki persimpangan.
- (3) Perlunya petugas lapangan (Dishub) yang bertugas secara intensif dalam mengatur kelancaran lalu lintas.

8) Nagrek

Pengaturan dan penertiban lalu lintas sepanjang jalur Selatan antara Limbangan-Nagrek yang rawan kemacetan/kecelakaan akibat tanjakan curam, pasar dan persilangan sebidang dengan kereta api.

9) Lintas Wangon – Batas Jawa Barat

Pada jalur selatan karena curah hujan yang tinggi, sangat rawan terhadap bahaya banjir dan longsor seperti di wilayah Kebumen (rawan banjir) dan pada ruas jalan antara Wangon – Batas Jawa Barat (rawan longsor) dan terdapat 15 titik rawan longsor yang dapat diidentifikasi.

10) Lintas Penyeberangan.

Terminal penyeberangan, Ujung-Kamal, Ketapang-Gilimanuk, Padang Bai-Lembar dan Kayangan-Pototano mengacu kepada pengaturan di terminal penyeberangan Merak-Bakauheni dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan.

11) Kereta Api.

- (a) Pemantauan dilakukan untuk memeriksa kesiapan operasional kereta api antara lain:
 - (1) Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka);
 - (2) Kesiapan stasiun-stasiun pemberangkatan;
 - (3) Pemantauan kesiapan operasional kereta api, meliputi:
 - Kereta api reguler;
 - Kereta api tambahan;
 - Kereta api sapujagat.
 - (4) Mencari informasi lokasi-lokasi rawan longsor dan rawan kecelakaan;

- (5) Mengidentifikasi dan mengantisipasi daerah-daerah yang sering mendapat gangguan pelemparan.
- (b) Lokasi kegiatan pemantauan operasional Kereta api, meliputi:
- (1) Lintas Jakarta – Bandung – Kroya di DAOP I dan II;
 - (2) Lintas Jakarta – Cirebon – Semarang di DAOP I, III dan IV;
 - (3) Lintas Cirebon – Kroya – Solo - Yogyakarta di DAOP III, V dan VI;
 - (4) Lintas Semarang – Surabaya di DAOP IV dan VII;
 - (5) Lintas Solo – Madiun – Surabaya di DAOP VI, VII dan VIII;
 - (6) Lintas Surabaya – Banyuwangi – Kroya di DAOP VIII dan IX;
- (c) Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa angkutan lebaran 2005 (1426 H) ditetapkan skenario operasi sebagai berikut :
- (1) KA angkutan lebaran mengacu pada Gapeka 2004;
 - (2) Kekurangan perjalanan KA akan ditambah dengan menjalankan MALKA (maklumat KA) angkutan lebaran;
 - (3) Penambahan rangkaian cadangan bagi pengoperasian kereta api "V slag" (rawan lambat tinggi);
 - (4) Pembatalan KA - KA barang, kecuali untuk kebutuhan pokok dan strategis (BBM).

Satuan Tugas Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu mengatur kelancaran, ketertiban dan keselamatan arus kendaraan di sepanjang perjalanan sesuai dengan daerah tanggung jawab masing-masing serta harus mewaspadaikan akan terjadinya arus balik bus penumpang yang perlu mendapat prioritas pengaturannya, agar dapat kembali ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang dan kota-kota asal lainnya secepat mungkin. Hal ini dimaksudkan guna menghindari atau mengurangi gejolak, rasa tidak puas dan bahkan rasa panik bagi para pemudik yang biasanya sudah lama menunggu angkutan di berbagai terminal pemberangkatan bus yang sudah disediakan.

c. Kegiatan Angkutan Arus Balik.

Puncak arus balik diperkirakan terjadi lima hari setelah lebaran kedua (H+5), akan tetapi biasanya mulai terjadi pada H + 3 sampai H + 7. Khusus arus balik dengan angkutan kereta api pada umumnya berlangsung lebih panjang sehingga perlu diwaspadai hal - hal sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan pengaturan arus lalu lintas angkutan penumpang dan kendaraan harus terus ditingkatkan, terutama dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban dan keselamatan masyarakat yang umumnya sudah lelah dengan bekal yang sudah sangat terbatas.
- 2) Kebanyakan penumpang arus balik tiba kembali di kota pada malam hari, dan sering menghadapi kesulitan memperoleh pelayanan angkutan kota, lebih-lebih pada saat ini armada angkutan kota yang dapat disediakan untuk angkutan malam hari jumlahnya sangat terbatas.
- 3) Menyediakan secara maksimal segala fasilitas yang dapat membantu pelayanan bagi para penumpang yang sengaja bermalam di terminal bus menunggu siang hari karena alasan keamanan.

C. Transportasi Laut.

1. Angkutan Lebaran melalui transportasi laut meliputi angkutan penumpang kapal laut, angkutan bahan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, cabe merah, bawang merah, kacang tanah, daging sapi, daging ayam, dan telur serta angkutan ternak potong untuk memenuhi kebutuhan di wilayah JABOTABEK dan kebutuhan di wilayah lainnya sesuai dengan program instansi terkait seperti Bulog, Departemen Perdagangan dan Dep. Pertanian.
2. Pengaturan dan perencanaan operasional meliputi sistim pelayanan, keselamatan pelayaran dan pengangkutan bahan pokok dan ternak potong.
3. Untuk pengendalian dan pemantauan perlu memperhatikan lonjakan penumpang dan atau situasi persediaan dan harga bahan pokok dengan cara bekerjasama (koordinasi) dengan instansi terkait.
4. Guna menjamin kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran melalui transportasi laut di seluruh Indonesia, ditetapkan rencana operasi moda

laut.

D. Transportasi Udara.

1. Dengan arus penumpang melalui udara yang diperkirakan mengalami kenaikan **35 %**, perlu dipersiapkan tindakan untuk memaksimalkan utilitas pesawat udara berjadwal maupun tidak berjadwal (borongan) dan penambahan jam operasi Bandara.
2. Peningkatan pelayanan sistem reservasi dan memperkecil atau meniadakan "*Over Booking*" untuk menjamin kelancaran dan kepastian keberangkatan penumpang serta untuk menghindari tiket habis akan tetapi tempat duduk kosong atau penumpang dengan status "OK" tidak terangkut.
3. Penyediaan informasi yang lengkap, jelas dan tersebar antara lain tentang rute penerbangan, kapasitas yang tersedia, jadwal penerbangan, counter transit dan ruang transit di 20 bandara.
4. Pengaturan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan keamanan penerbangan pada semua Bandara, terutama pada Bandara – Bandara yang cukup padat antara lain Soekarno Hatta - Jakarta, Polonia - Medan, Juanda - Surabaya, Ngurah Rai - Denpasar, Hasanuddin - Makasar.
5. Menambah "Counter Check In" di bandar udara untuk menjamin kelancaran dan ketertiban keberangkatan penumpang pada Bandara yang cukup padat seperti tersebut di atas.
6. Penambahan frekuensi penerbangan pada rute padat, dalam dan luar negeri.
7. Kerjsa sama dengan perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal, sepanjang memenuhi persyaratan kelaikan dan keselamatan penerbangan.
8. Penambahan jam operasi Bandar udara sesuai dengan kebutuhan dan fasilitasnya serta memenuhi syarat keselamatan penerbangan.
9. Menambah untuk kelancaran penanganan penumpang, jika terjadi antrian panjang.
10. Sistem reservasi terpadu yang efektif dan efisien.
11. Sistem transfer yang mudah dan cepat dengan cara memperbanyak counter transfer dan transit dengan rambu-rambu jelas serta Sistem Informasi Manajemen yang memungkinkan komunikasi antar stasiun dan Bandara.

12. Menetapkan tarif Angkutan Udara sebagai berikut :
 - a. Penerapan tarif harga jual perusahaan angkutan udara niaga berjadwal harus tetap dapat menjamin keselamatan penerbangan dan dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan.
 - b. Kepada penyelenggara Bandara diminta ikut memonitor pemberlakuan tarif harga jual penumpang kelas ekonomi angkutan udara dalam negeri berdasarkan KM. 9 Tahun 2002.
 - c. Pada "*Low Season*" dihimbau jangan memberlakukan tarif yang dapat merugikan sendiri (tarif harga jual di bawah biaya) dan pada "*high/peak season*" (masa lebaran) tidak boleh melebihi tarif batas atas, sebagaimana KM. 9 Tahun 2002 serta menghimbau kepada para penyelenggara bandara untuk menindak tegas para calo bandara.
13. Penyelenggara diminta untuk menyiapkan bandara guna mensukseskan angkutan lebaran dengan tetap meningkatkan kewaspadaan terkait aspek keamanan dan keselamatan penerbangan.
14. Apabila terjadi kekurangan kapasitas angkut pada salah satu perusahaan, untuk mencegah terjadinya keriuhan di bandara maka para penyelenggara bandara supaya mengkoordinir para perusahaan yang beroperasi di bandara tersebut.
15. Berkoodinasi dengan Angkutan udara tidak berjadwal untuk menyiapkan pesawatnya dalam hal :
 - a. Kapasitas Angkutan lebaran tidak mencukupi.
 - b. Terjadi peningkatan penumpang yang mendadak tinggi.
 - c. Menggunakan tarif yang berlaku KM. 9 Tahun 2002.
 - d. Menyesuaikan status angkutan sesuai angkutan udara berjadwal.
 - e. Mengikuti peraturan yang berlaku untuk angkutan udara berjadwal baik penumpang, barang dan pos.

E. Lokasi Posko, Jaringan Komunikasi Posko/ Sistem Informasi

1. Lokasi Posko

Untuk mengantisipasi kondisi dan situasi saat pelaksanaan angkutan lebaran seperti :

- a. Pelayanan penumpang di terminal dan stasiun terutama pada saat jumlah penumpang mencapai puncak;

- b. Pengalihan arus lalu lintas angkutan barang dan kendaraan tidak umum pada saat mendekati hari puncak;
- c. Perubahan arus lalu lintas secara insidental untuk daerah rawan macet, rawan kecelakaan dan bencana alam.

Maka diperlukan pembentukan Posko-Posko di tiap-tiap terminal maupun stasiun utama seperti Terminal : Kampung Rambutan, Pulo Gadung, Lebak Bulus, Merak, Kalideres, Damri Kemayoran, Tirtanadi, Tegal, Harjamukti, Cicaheum, Purwokerto; Stasiun: Gambir, Senen, Tawang, Poncol, Solo Balapan, Tegal, Kutoarjo.

Disamping itu untuk pengaturan dan pengendalian lapangan pada lokasi-lokasi kritis, rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dibentuk adanya Pos Koordinasi Lapangan (Poskorlap) yang dilaksanakan selama masa penyelenggaraan angkutan lebaran.

Kegiatan Poskorlap yang secara koordinatif melibatkan personil dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan Propinsi/Kabupaten/Kota dan Polri dilaksanakan dengan menggunakan pola statis dan mobile dengan lokasi sebagai berikut:

- Ujung Tol Gerem
- Ujung Tol Cikampek
- Nagrek
- Kadipaten
- Patrol
- Padalarang
- Sadang

2. Jaringan Komunikasi Posko/Sistem Informasi.

Untuk membantu memudahkan koordinasi dan komunikasi antara posko yang satu dengan yang lain diperlengkapi dengan alat komunikasi pada tiap-tiap posko baik menggunakan radio trunking, telepon/ faximile (No. 021 3506129; 3506138). Untuk hubungan komunikasi dengan **Pos Koordinasi Harian Angkutan Lebaran Terpadu** yang berada di **Ruang Majapahit Lantai 2 Gedung Karsa Departemen Perhubungan, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta**. Disamping peralatan komunikasi tersebut dalam sistem informasi akan digunakan juga website <http://www.hubdat.go.id>.

Pada lebaran tahun 2005 (1426 H) ini dalam monitoring kondisi lalu lintas dan angkutan akan dilakukan dengan menggunakan fasilitas CCTV yang ditempatkan pada titik-titik : Padalarang, Nagrek, Paiimanan, Jatibarang, Patrol, Cileunyi, Stasiun Gambir, Pelabuhan Penyeberangan Merak/ Bakauheni, Bandara Soetta, Bandara Juanda, Pelabuhan Tj. Priok, Pelabuhan Tj. Perak dan Pelabuhan Makassar yang terhubung secara on-line dengan Pos Koordinasi Harian Angkutan Lebaran Terpadu. Pos Koordinasi tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 27 Oktober 2005 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 11 Nopember 2005 pukul 08.00 WIB.

X. PENGORGANISASIAN

A. KOORDINASI

1. KOORDINASI DENGAN DEPARTEMEN PEMERINTAHAN

Untuk memperoleh efektifitas yang tinggi dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H), perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi, sebagai berikut :

a. Koordinasi dengan Departemen Pekerjaan Umum

- 1) Melakukan kunjungan bersama ke lapangan untuk memperoleh data tentang keadaan dan prasarana jalan dan jembatan, sebagai acuan untuk melakukan perbaikan, peningkatan atau pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan angkutan lebaran;
- 2) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan di jalan tol dan meningkatkan segala fasilitas untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas di semua jalan tol;
- 3) Mempersiapkan sarana dan fasilitas untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, bencana alam atau kejadian lain yang mengganggu kelancaran angkutan lebaran;

b. Koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri.

Koordinasi dilakukan agar Menteri Dalam Negeri dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota agar penyelenggaraan angkutan lebaran dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

c. Koordinasi dengan Departemen Perdagangan.

Koordinasi dilakukan dalam pengaturan kelancaran distribusi bahan pokok selama masa Angkutan Lebaran 2005 (1426 H).

d. Koordinasi dengan Departemen Kesehatan.

Untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan yang ada pada lokasi-lokasi tertentu pada jalur Angkutan Lebaran 2005 (1426 H) kepada masyarakat pemudik yang memerlukan bantuan kesehatan.

e. Koordinasi dengan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi

Melakukan penyebaran informasi Angkutan Lebaran 2005 (1426 H) kepada seluruh masyarakat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Angkutan Lebaran 2005 (1426 H).

f. Koordinasi dengan Departemen Agama

Untuk menghilangkan pos-pos pundi amal yang dibangun oleh masyarakat sepanjang jalur utama dan jalur alternatif lebaran.

g. Koordinasi TNI

- 1) Melakukan koordinasi untuk memperoleh bantuan alat transportasi baik angkutan laut, angkutan darat maupun angkutan udara milik TNI sesuai kemampuan yang tersedia, apabila sewaktu-waktu diperlukan.
- 2) Melakukan koordinasi untuk memperoleh bantuan pengamanan, khususnya bagi daerah atau lintasan yang dipandang perlu.

h. Koordinasi dengan Kepolisian RI.

Menyiapkan dan melaksanakan langkah/tindakan penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan, sejalan dengan Rencana Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2005 (1426 H) dan Rencana Operasi Ketupat Lebaran 2005 (1426 H).

i. Koordinasi dengan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pengaturan/penyediaan BBM.

- j. Koordinasi dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi** dalam pengaturan mudik bersama.
- k. Koordinasi dengan Departemen Pertanian,** dalam rangka kelancaran distribusi penyediaan bahan pangan.
- l. Koordinasi dengan PT. (Pesero) Jasa Raharja** dalam rangka pelayanan asuransi apabila terjadi kecelakaan.
- m. Koordinasi dengan Para Gubernur** selaku **Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi** Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) di masing-masing Propinsi, agar melakukan langkah-langkah untuk menciptakan angkutan lebaran yang aman, tertib dan lancar di wilayahnya dengan kegiatan :
- 1) Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu kepada Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional.
 - 2) Mengkoordinasikan Bupati/Walikota di wilayahnya untuk menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta mempersiapkan kebutuhan angkutan yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah masing-masing, baik darat, laut maupun udara.
 - 3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H).
 - 4) Mempersiapkan fasilitas umum dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.
 - 5) Membentuk Tim Pos Koordinasi Terpadu di Tingkat Propinsi sebagai sarana komunikasi dengan Pos Koordinasi Tingkat Nasional dan Pos Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota.
 - 6) Menyampaikan laporan harian penyelenggaraan angkutan lebaran kepada Menteri Perhubungan melalui Pos Koordinasi Tingkat Nasional.
 - 7) Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.

8) Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional.

n. Koordinasi dengan Para Bupati/Walikota selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Kabupaten/Kota Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) di masing-masing Kabupaten/Kota, agar melakukan langkah-langkah untuk menciptakan angkutan lebaran yang aman, tertib dan lancar diwilayahnya dengan kegiatan :

- 1) Menyusun rencana operasi penyelenggaraan angkutan lebaran sesuai situasi dan kondisi daerah masing – masing dengan mengacu kepada Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2005 (1426 H) Tingkat Nasional dan Propinsi.
- 2) Menyusun rencana dan program kerja dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu lintas serta mempersiapkan kebutuhan angkutan yang diperlukan dalam penyelenggaraan angkutan di wilayah masing-masing, baik darat, laut maupun udara.
- 3) Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi dalam rangka penyelenggaraan angkutan lebaran.
- 4) Melakukan optimalisasi dan perbaikan prasarana transportasi di wilayahnya sesuai kewenangannya.
- 5) Mengambil langkah – langkah yang diperlukan untuk mengurangi terjadinya kemacetan dan kecelakaan serta mengantisipasi daerah rawan bencana alam (banjir, tanah longsor, kabut) di wilayahnya.
- 6) Mengawasi pelaksanaan tarif angkutan, kelaikan kendaraan dan tanggap darurat serta mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku apabila dijumpai pelanggaran.
- 7) Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional melalui Koordinator Pelaksana Tingkat Propinsi.

2. KOORDINASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

- 1) Menjabarkan Kegiatan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2005 (1426 H) dalam Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2005 (1426 H).

- 2) Bersama instansi terkait mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan angkutan pada masa Angkutan Lebaran.
- 3) Menyiapkan petugas dan peralatan untuk pelaksanaan penyelenggaraan Angkutan Lebaran secara terencana khususnya kemampuan analisis dan cara bertindak yang tepat.
- 4) Merencanakan dan melaksanakan latihan/gladi kemampuan penyelenggaraan sebelum pelaksanaan Angkutan Lebaran.
- 5) Mengatur personil dan peralatan komunikasi baik yang bersifat stasioner, mobile maupun khusus untuk kepentingan komunikasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran.
- 6) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.
- 7) Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran Terpadu.

b. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- 1) Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan angkutan laut pada masa Angkutan Lebaran 2005 (1426 H).
- 2) Memanfaatkan secara maksimal sarana dan prasarana angkutan laut yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran .
- 3) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan Mabes TNI-AL.
- 4) Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran.

c. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

- 1) Mengkoordinasikan seluruh unit kerja angkutan udara dan instansi terkait dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2005 (1426 H).
- 2) Menyiapkan secara maksimal sarana dan prasarana yang dapat dioperasikan untuk mendukung Angkutan Lebaran.
- 3) Mengkoordinasikan dengan penyelenggara bandar udara agar meningkatkan kesiapan fasilitas di bandar udara, menyiapkan posko di Bandar udara, menyiapkan kotak saran di *check in area*, memberantas calo di bandara, sistem keamanan (*security*) di bandara, penyampaian laporan dan informasi penting mengenai penyelenggaraan angkutan ke Posko Tingkat Nasional.

- 4) Melakukan koordinasi dengan perusahaan angkutan udara tidak berjadwal untuk menyiapkan pesawatnya dalam hal terjadi kapasitas angkutan lebaran tidak mencukupi atau terjadi peningkatan penumpang yang mendadak tinggi.
- 5) Melakukan koordinasi dengan TNI Angkutan Udara dalam hal permohonan pesawat TNI-AU dapat dipakai untuk mengangkut penumpang di bandar udara sipil apabila terjadi permintaan penumpang yang cukup tinggi dan sangat mendesak.
- 6) Menyiapkan Posko Angkutan Lebaran.

d. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan analisis dan evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2005 (1426 H).

e. Badan SAR Nasional.

- 1) Mengkoordinasikan kesiapan, kesiagaan dan pengendalian unsur-unsur SAR di seluruh wilayah tanggung jawab SARNAS, dalam rangka mengantisipasi terjadinya musibah pelayaran, penerbangan dan bencana lainnya.
- 2) Mempersiapkan serta mengendalikan unsur SAR di Pusat dan Daerah, dalam penanggulangan musibah maupun untuk kepentingan pemantauan arus lalu lintas.
- 3) Mempersiapkan sarana helikopter untuk pemantauan via udara oleh pejabat tinggi negara.

f. Badan Meteorologi dan Geofisika.

Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan informasi sesuai dengan bidang tugasnya kepada seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2005 (1426 H), khususnya pada musim Hujan dan musim Barat.

3. KOORDINASI DENGAN INSTANSI lainnya seperti :

Koordinasi dengan Asosiasi/ Organisasi Masyarakat seperti ORGANDA, INACA, INSA, GAPASDAP, GAIKINDO, IMI, MTI, MASKA, TVRI, RRI, RCTI, SCTV, ANTV, TPI, INDOSIAR, METROTV, TVGLOBAL, TRANSTV, RADIO SONORA, RADIO SALVATORE, ORARI, RAPI, PRSNI, YLKI, ORGANISASI PEMUDA DAN PRAMUKA untuk membantu pelaksanaan kelancaran dan pengamanan dalam rangka mendukung keberhasilan Angkutan Lebaran.

B. LOGISTIK DAN ANGGARAN, PENGENDALIAN SERTA INSTRUKSI

1. Logistik dan Anggaran

- a. Dukungan logistik untuk penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2005 (1426 H) menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.
- b. Kebutuhan biaya untuk pelaksanaan Angkutan Lebaran disesuaikan dengan anggaran yang tersedia pada unit kerja masing-masing.

2. Pengendalian Penyelenggaraan.

- a. Di Tingkat Pusat oleh Menteri Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dirjen Perhubungan Darat.
- b. Di tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan/ LLAJ Propinsi setempat.
- c. Di tingkat Kabupaten atau Kota dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan /LLAJ Kota / Kabupaten setempat.
- d. Laporan kepada Menteri Perhubungan dilaksanakan setiap hari dan/atau setiap saat dibutuhkan.

3. Lain-lain :

- a. Koordinasi perencanaan antar Departemen, antar sektor dan antar instansi baik di Tingkat Nasional maupun daerah diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dengan unsur Perhubungan sebagai pihak yang mengambil inisiatif.
- b. Berbagai hambatan dan kerawanan yang terjadi di lapangan agar diatasi secara terkoordinasi disesuaikan dengan kondisi dan situasi spesifik daerah oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan wilayah tanggung jawab masing - masing.
- c. Tingkatkan dan mantapkan koordinasi serta kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait dengan melibatkan masyarakat di wilayah masing - masing.
- d. Cegah dan hindari kegiatan dan atau tindakan over acting dan perbuatan negatif lain yang dapat menghambat kelancaran penyelenggaraan angkutan lebaran.

- e. Kesiapan personil dilakukan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan. Perkuatan baik personil maupun sarana dikoordinasikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan baik oleh pusat maupun daerah.
- f. Gelar apel kesiapsiagaan petugas dilaksanakan secara serentak sesuai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- g. Hari H (Idul Fitri 1426 H) akan disesuaikan berdasarkan penetapan Pemerintah oleh Menteri Agama.

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan resmi sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102